**STRATEGI PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI KAWASAN SEBANGAU**

**Bhayu Rhama**

ABSTRACT

This study is aimed to describe and analyse the strategies of local governments in developing sustainable tourism in Sebangau Subdistrict, Palangka Raya. This research is a qualitative research to obtain a comprehensive and in-depth picture related to the problem and collects primary data from the Culture and Tourism Office of Palangka Raya City, tourist attractions in Sebangau District, and local communities around the Sebangau District tourist area. Data sources are also obtained from secondary data such as archives or library materials that are used as support. Data collection is done using observation, interviews, and documentation. Analysis of research data is carried out through stages which include data reduction, data exposure, and drawing conclusions / verification. The study shows that the strategy of the local government of Palangka Raya in developing sustainable tourism in Sebangau District is carried out on the development of human and natural resources. Human resource development strategies include education development, health development, improving the quality of the poor, and suppressing the rate of population growth. One-way natural resource development strategies include the development of tourism areas that are only carried out in a small area, tourism development is also carried out by not changing the landscape base, as well as the construction of tourist infrastructure in accordance with local identity. Supporting factors for sustainable tourism development strategies are awareness of the local community about the importance of the tourism area. The role of relevant parties who participated in encouraging the development of sustainable tourism. While the inhibiting factors of the strategy for developing sustainable tourism is to provide a deeper understanding of tourism to the community. In addition, budget limitations are also the second limiting factor in sustainable tourism development

***Keywords: Sustainable tourism, development, strategy, local government***

**PENDAHULUAN**

Sektor pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan di mana sektor pariwisata di dalamnya menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja.

Pariwisata selama setengah abad terakhir sebagaimana menurut Rhama (2019: 3) telah muncul sebagai salah satu fenomena sosial dan ekonomi paling signifikan dari zaman modern. Pertumbuhan pada sektor pariwisata terus mengalami peningkatan yang luar biasa dan tumbuh secara konsisten. Berdasarkan dari data UNWTO (United Nation World Tourism Organization) jumlah kedatangan wisatawan pada tahun 1950-an mencapai 25,3 Juta dan terus mengalami peningkatan setiap tahun, hingga tahun 2012 untuk pertama kalinya jumlah total kedatangan wisatawan internasional melampaui satu miliar orang (Rhama, 2019:4).

Di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat sungai-sungai besar, Provinsi Kalimantan Tengah juga memiliki beberapa kawasan taman nasional yang salah satunya adalah Taman Nasional Sebangau yang berada di wilayah Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Pulang Pisau.

Sebagai salah satu kawasan wisata yang berbasis pada alam atau ekowisata di Kota Palangka Raya, wilayah Kecamatan Sebangau sebagai KSP-4 di dalamnya juga terdapat kawasan yang masuk ke dalam wilayah Taman Nasional Sebangau. setidaknya dari luas wilayah yang dimiliki Taman Nasional Sebangau, 10 persen wilayahnya ada di wilayah Administratif Kota Palangka Raya. Sehingga dengan adanya bagian kawasan Taman Nasional Sebangau telah memberikan kesempatan bagi Pemerintah Kota Palangka Raya untuk membangun kawasan wisata alam yang tentunya harus dibangun sesuai dengan asas dan prinsip pariwisata berkelanjutan.

Pariwisata berkelanjutan juga harus memberikan cerminan identitas lokal dalam pembangunan, sebagaimana menurut Sharpley (2000: 10) bahwa produk dari pariwisata berkelanjutan harus dilaksanakan secara harmonis dengan lingkungan lokal yang di antaranya adalah masyarakat lokal dan budaya lokal agar dapat memberikan keuntungan yang permanen dan tidak menjadi penerima dampak dari pembangunan pariwisata. Oleh sebab itu, Sharpley menjelaskan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan pariwisata berkelanjutan harus ditekankan ke arah penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk jangka waktu yang panjang.

**TINJAUAN PUSTAKA**

Pembangunan merupakan suatu proses pembaharuan yang berkelanjutan dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata (Kuncoro, 2010: 20) pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama (Wresniwiro, 2012). Sebagai contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa, peningkatan kesehatan masyarakat (Wresniwiro, 2012).

Pengertian pembangunan berkelanjutan sejak diperkenalkan oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) sebagaimana tertuang dalam *Our Common Future* atau laporan Brundtland, sampai saat ini masih masuk dalam ranah perdebatan antar para ahli lingkungan. Hal ini menimbulkan banyak interpretasi definisi mengenai pembangunan berkelanjutan. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Cronin dalam Sharpley (2000: 17) menyatakan bahwa konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai pembangunan terfokus pada dua hal, yaitu fokus pada keberlanjutan pariwisata sebagai aktivitas ekonomi di satu sisi dan disisi yang lainnya mempertimbangkan pariwisata sebagai elemen kebijakan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Produk pariwisata berkelanjutan harus dioperasikan secara harmonis dengan lingkungan lokal, masyarakat dan budaya, sehingga mereka menjadi penerima keuntungan yang permanen dan bukan korban pembangunan pariwisata. Dalam hal ini kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan menekankan agar terarah pada penggunaan sumber daya alam dan penggunaan sumber daya manusia untuk jangka waktu yang panjang (Sharpley, 2000: 10).

Pengembangan strategi dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan dan memperbaiki konsep perencanaan strategi sebelumnya, dari beberapa rencana yang telah tersusun perlu diperhatikan kembali efektivitas dan efisiensi dalam penerapan pelaksanaan rencana strategi tersebut. Pengembangan strategi dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan yang dalam hal ini adalah pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya, asas dan nilai keberlanjutan jangka panjang harus diperhatikan. Selain terfokus pada pariwisata sebagai aktivitas ekonomi dan elemen kebijakan pembangunan yang lebih luas, kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam harus benar-benar diperhatikan, sebagaimana menurut Sharpley (2000: 10) bahwa dalam hal kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan harus terarah pada pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk jangka panjang. .

**Strategi pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia)**

SDM di bidang pariwisata yang menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam pengelolaan pariwisata sebagaimana menurut Bhayu Rhama (2013) sangat dibutuhkan karena tuntutan globalisasi yang sudah diambang pintu. Lebih lanjut dijelaskan oleh Rhama (2013) bahwa Kalimantan Tengah memiliki potensi yang luar biasa untuk pariwisata khususnya yang berhubungan dengan alam / Eco-tourism, namun *share holder* yang terlibat dalam pembangunan tersebut masih sangat minim mulai dari penyedia informasi hingga operator wisata. Penyebab dari minimnya hal tersebut dikarenakan minimnya wawasan masyarakat lokal ataupun lapangan pekerjaan yang memberikan hasil secara instan bagi masyarakat masih mudah diperoleh (Rhama, 2013).

Pengembangan kualitas sumber daya manusia adalah upaya pengembangan manusia menyangkut pengembangan aktivitas dalam bidang pendidikan, pelatihan, kesehatan dan gizi. Pengertian ini memusatkan pada pemerataan dalam meningkatkan kemampuan manusia dan pada pemanfaatan kemampuan tersebut (Sein, 2009). Menurut Mulyadi (2003: 2) kebijakan dalam meningkatkan kualitas hidup antara lain meliputi:

1. Pembangunan pendidikan akan memperhatikan arah pembangunan ekonomi di masa yang akan datang. Dalam membangun kualitas pendidikan sendiri pada dasarnya tidak terfokus hanya pendidikan formal saja, salah satu upaya selain pendidikan formal adalah pendidikan informal, yaitu dalam bentuk pelatihan-pelatihan atau kursus. Kebijakan terkait pembangunan pendidikan dan pariwisata, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2017 tentang “Standar Kompetensi Lulusan Kursus Dan Pelatihan Bidang Keterampilan Kepemanduan Wisata, Pemeliharaan Taman, Pekarya Kesehatan, Petukangan Kayu Konstruksi, Pemasangan Bata, Perancah, Pemasangan Pipa, Mekanik Alat Berat, Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing, Pembuatan Batik Dengan Pewarna Ramah Lingkungan, Pembuatan Malam Batik, Pembuatan Batik Dengan Pewarna Sintetis, Pembuatan Alat Canting Tulis, Dan Pembuatan Canting Cap”. Artinya bahwa strategi pengembangan sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan dapat dilakukan melalui pemberian pelatihan terkait kepariwisataan.
2. Pembangunan kesehatan mendapat perhatian dengan menanamkan budaya hidup sehat serta memperluas cakupan pelayanan kesehatan terutama pada penduduk terpencil. Dalam hal ini pembangunan kesehatan tidak terlepas daripada lingkungan yang bersih, tentunya dalam masyarakat budaya hidup sehat tidak hanya terbatas pada kesehatan individual saja. Menjaga kebersihan lingkungan juga dapat dikatakan sebagai budaya hidup sehat.
3. Peningkatan kualitas bagi penduduk miskin dilakukan dengan memberikan keterampilan praktis, menumbuhkan sikap produktif serta mendorong semangat keswadayaan dan kemandirian untuk bersama melepas diri dari kemiskinan. Dengan terbukanya suatu sektor wisata di suatu wilayah tertentu pastinya akan membuka peluang pula bagi masyarakat dalam mengembangkan dunia usaha atau wiraswasta.
4. Menekan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan pelaksanaan gerakan keluarga berencana, serta meningkatkan keseimbangan kepadatan dan penyebaran penduduk antara lain melalui transmigrasi dan industri di pedesaan.

**Strategi pengembangan SDA (Sumber Daya Alam)**

Dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, seluruh aspek mengenai sumber daya alam menjadi bagian terpenting yang harus diperhatikan oleh seluruh stakeholder. Bagaimana mengelola, menjaga serta melestarikan sumber daya alam pada sektor pariwisata adalah bagian utama yang harus disusun dan direncanakan kebijakannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam dijelaskan bahwa prinsip-prinsip pengembangan wisata alam dan kriteria-kriteria pengembangan dioperasionalisasikan dalam pengembangan pariwisata alam yang diarahkan pada:

1. Pengusahaan/pengembangan pariwisata alam dilaksanakan pada sebagian kecil areal blok pemanfaatan, dan tetap memperhatikan pada aspek kelestarian.
2. Pengusahaan/pengembangan wisata alam tidak dibenarkan melakukan perubahan mendasar pada bentang alam dan keaslian habitat.
3. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata harus didasarkan pada identitas lokal.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Sebangau, dalam hal ini peneliti ingin menggali permasalahan dan gejala dari aspek-aspek pengembangan pariwisata di kawasan Sebangau. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif serta dipaparkan secara deskritif. Penggunaan data yang diperoleh berupa jenis data primer dan data sekunder. Narasumber yang diwawancarai yaitu Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palangka Raya, pengunjung objek pariwisata Sebangau, dan masyarakat lokal yang tinggal di lingkungan objek Wisata Sebangau. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data, reduksi data, dan kategori data.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Strategi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam Membangun Pariwisata Berkelanjutan di Kecamatan Sebangau**

Keterkaitan antara aktivitas pariwisata dan konsep pembangunan berkelanjutan sebagaimana dijelaskan oleh Cronin dalam Sharpley (2000: 17) terfokus pada dua hal, yaitu keberlanjutan pariwisata sebagai aktivitas ekonomi di satu sisi dan disisi yang lainnya mempertimbangkan pariwisata sebagai elemen kebijakan pembangunan berkelanjutan yang lebih luas. Stabler & Goodall dalam Sharpley (2000: 1) pembangunan pariwisata berkelanjutan haruslah konsisten pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Produk daripada pariwisata berkelanjutan harus sejalan dengan lingkungan, masyarakat dan budaya lokal selaku penerima manfaat berkelanjutan dari adanya pariwisata. Menurut Sharpley (2000: 10) kebijakan pembangunan pariwisata berkelanjutan harus menekankan pada arah pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk jangka waktu yang panjang yang akan didiskusikan sebagai berikut.

***Pembangunan Sumber Daya Manusia***

Sumber daya manusia dalam pembangunan khususnya pariwisata berkelanjutan merupakan bagian terpenting dalam menentukan keberhasilan daripada pembangunan pariwisata. Pengembangan kualitas sumber daya manusia menurut Sein (2009) adalah upaya pengembangan manusia yang menyangkut pengembangan aktivitas dalam bidang pendidikan, pelatihan, kesehatan dan gizi. Sebagai strategi dalam membangun SDM, Mulyadi (2003: 2) menyebutkan bahwa kebijakan dalam meningkatkan kualitas hidup sumber daya manusia meliputi pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan, peningkatan kualitas bagi penduduk miskin, dan menekan laju pertumbuhan penduduk.

1. Pembangunan Pendidikan

Pendidikan memiliki peran dalam meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia termasuk dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Pendidikan khususnya yang menyangkut tentang pendidikan kepariwisataan merupakan salah satu kunci dalam membangun dan mengembangkan pariwisata, dimana bidang ini memerlukan tenaga kerja yang terampil yang secara terus menerus harus dikembangkan**.**

Pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun sumber daya manusia melalui pendidikan masih belum ada upaya dan perhatian yang dilakukan oleh pemerintah. Temuan hasil penelitian lebih lanjut, pendidikan dibidang pariwisata di Kecamatan Sebangau pada dasarnya masih kurang diminati oleh masyarakat.

Mengenai pendidikan informal dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa masyarakat di Kawasan Wisata Sebangau belum menyediakan kerajinan-kerajinan tangan atau yang menjadi ciri khas yang dapat dijual kepada wisatawan. Namun hal ini sebenarnya juga sudah dilakukan upaya oleh Pemerintah Kota Palangka Raya atau pihak-pihak terkait dengan memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan praktis terkait hal tersebut (membuat souvenir-souvenir dan benda-benda yang memiliki ciri khas tersendiri.

1. Pembangunan Kesehatan

Salah satu indikator mengenai kualitas sumber daya manusia adalah kondisi kesehatan baik sehat secara lahir maupun batin setiap orang. Menurut Todaro (2005), kesehatan dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital dan merupakan *input* fungsi produksi yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Hal ini diperkuat dengan sebagaimana disebutkan dalam *Indonesian Human Development Report* (2004) bahwa pembangunan manusia sangat berkepentingan dengan kapabilitas manusia termasuk di dalamnya adalah peningkatan dalam kesehatan dan pendidikan

Pembangunan kesehatan menjadi perhatian penting dalam pembangunan sumber daya manusia khususnya pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya. Sebagai salah satu strategi pemerintah dalam membangun kesehatan sebagaimana temuan dalam hasil penelitian adalah dengan memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan dengan menanamkan pola budaya hidup sehat bagi masyarakat di Kelurahan Kereng Bangkirai.

1. Peningkatan Kualitas Bagi Penduduk Miskin

Peningkatan kualitas bagi penduduk miskin dilakukan dengan memberikan keterampilan praktis, menumbuhkan sikap produktif serta mendorong semangat keswadayaan dan kemandirian untuk bersama melepas diri dari kemiskinan. Dengan terbukanya suatu sektor wisata di suatu wilayah tertentu pastinya akan membuka peluang pula bagi masyarakat dalam mengembangkan dunia usaha atau wiraswasta. Seiring dengan berkembangnya sektor pariwisata di suatu wilayah tertentu.

Peningkatan kualitas baik dari segi keahlian, peran pemerintah dalam memberikan pelatihan-pelatihan meningkatkan keterampilan bagi masyarakat yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan kecil khususnya bagi ibu-ibu rumah tangga. Berkembangnya suatu wilayah menjadi kawasan wisata tentunya akan membuka peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk membangun usaha, semakin banyaknya jenis usaha maka akan tercipta juga peluang lapangan kerja bagi penduduk yang lain.

1. Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk.

Menekan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan pelaksanaan gerakan keluarga berencana, serta meningkatkan keseimbangan kepadatan dan penyebaran penduduk antara lain melalui transmigrasi dan industri di pedesaan. Namun mengenai pertumbuhan penduduk dalam hal ini yaitu masuknya penduduk luar daerah ke kawasan wisata adalah sebagai dampak dari pertumbuhan sektor industri pariwisata yang tentunya menciptakan peluang-peluang membuka usaha.

Pertumbuhan penduduk meningkat karena tingginya perpindahan penduduk dari luar daerah yang masuk ke wilayah ini, karena melihat peluang-peluang usaha dan kesempatan kerja, masyarakat dari luar daerah kemudian tinggal menetap dan membuka usaha atau mencari kerja di wilayah yang menjadi kawasan wisata tersebut.

Pemerintah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Sebangau khususnya Kelurahan Kereng Bangkirai adalah dengan sosialisasi dari BKKBN tentang program keluarga berencana (KB) kepada masyarakat. Namun dalam hal penekanan laju pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh adanya penyebaran penduduk dari wilayah lain sebagaimana disampaikan Syamsurizal selaku Lurah di Kereng Bangkirai bahwa terkait hal tersebut masih belum ada upaya dari pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan tersebut

***Pembangunan Sumber Daya Alam***

Pada pembahasan mengenai pembangunan sumber daya alam sebagai strategi pemerintah dalam membangun pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Sebangau, peneliti dalam hal ini mengadopsi prinsip-prinsip pengembangan wisata alam dan kriteria-kriteria pengembangan yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 1994 tersebut terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi dalam mengembangkan kawasan pariwisata alam yang dalam hal ini digunakan peneliti untuk mendeskripsikan pembangunan sumber daya alam pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Sebangau. Berdasarkan hal tersebut, pembangunan sumber daya alam pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Sebangau, yaitu:

1. Pengembangan Pariwisata Pada Sebagian Areal pemanfaatan

Terdapat beberapa zona wilayah pengembangan yang sedang dibangun oleh Pemerintah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disebut dengan kawasan strategis pariwisata (KSP), sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Palangka Raya Tahun 2017-2028 pada Pasal 10 Ayat 2 bahwa kawasan strategis pariwisata terdiri atas KSP 1-KSP Sei Gohong, KSP 2-KSP Tumbang Tahai, KSP 3-KSP Pahandut, dan KSP 4-KSP Kalampangan.

Membangun destinasi wisata pada sebagian areal pengembangan juga merupakan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara masif dan berlebihan yang kemudian berdampak pada kerusakan alam serta mengganggu kehidupan flora dan fauna di dalamnya. Pembangunan pada sebagian areal kawasan juga merupakan salah satu strategi untuk menjamin adanya prinsip berkelanjutannya dari sebuah kawasan sumber daya alam Taman Nasional Sebangau di Kecamatan Sebangau Kota Palangka Raya.

1. Pengembangan Wisata Alam Tanpa Mengubah Dasar Bentang Alam dan Keaslian Habitat.

Tidak mengubah dasar bentang alam dalam pembangunan kepariwisataan yang berbasis pada alam merupakan prinsip utama yang harus dipegang oleh seluruh pihak baik pemerintah maupun swasta dan tidak terkecuali pula oleh masyarakat lokal sekitar kawasan wisata alam khususnya masyarakat di Kelurahan Kereng Bangkirai

Pembangunan sarana prasarana serta fasilitas dalam memajukan industri sektor pariwisata khususnya wisata alam di Kecamatan Sebangau yang menjadi bagian dari Taman Nasional memang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Palangka Raya, dengan mengacu pada rencana induk pembangunan kepariwisataan, berbagai aspek dan prinsip mengenai lingkungan hidup dan asas pembangunan berkelanjutan. Maka dasar dari bentang alam kawasan sebangau tetap dijaga dengan baik, selain itu juga tetap menjaga keaslian habitat yang tinggal di dalamnya

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Berdasarkan pada Identitas Lokal.

Sebuah pendekatan terhadap identitas lokal merupakan bagian penting dalam membangun pariwisata berkelanjutan. Sebagaimana menurut Sharpley (2000: 10) bahwa produk dari pariwisata berkelanjutan harus dijalankan secara harmonis dengan lingkungan lokal, masyarakat lokal, dan budaya lokal sehingga kemudian mereka inilah yang menerima keuntungan secara permanen dari adanya destinasi pariwisata, dan bukan malah sebaliknya mereka menjadi korban dari pembangunan pariwisata.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, identitas lokal dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kota Palangka Raya khususnya di Kecamatan Kereng Bangkirai merupakan bagian yang harus ditonjolkan. Identitas lokal dipandang sebagai warisan budaya yang harus dijaga dan dirawat dengan baik.

Pembangunan sarana prasarana pada pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Sebangau khususnya yang berkaitan dengan bangunan Dermaga Kereng Bangkirai oleh pemerintah juga telah dibuat dengan corak dan ukiran bangunan mencerminkan nilai budaya masyarakat lokal yaitu identitas Budaya Dayak, seperti Batang Garing, Rumah Betang, Mandau, dan lain-lain.

**Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung**

***Faktor Pendukung Strategi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan***

Faktor pendukung dari strategi pemerintah dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah kesadaran masyarakat lokal akan pentingnya pariwisata dan potensi wisata alam yang tinggi, baik dari segi lanskap, flora, fauna serta pemandangan alam. Bahwa dengan adanya kawasan pariwisata tersebut dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal.

***Faktor Penghambat Strategi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan***

Adapun yang menjadi faktor penghambat dari strategi pemerintah dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan adalah: pertama yaitu dalam hal mengedukasi masyarakat lebih dalam, kesadaran dan seperti apa kesiapan masyarakat masih belum sepenuhnya paham akan hal tersebut.

Kemudian faktor yang kedua adalah masalah anggaran, dimana hal ini merupakan faktor utama dalam menunjang suatu pembangunan diberbagai sektor tidak terkecuali sektor pariwisata. Pemerintah Palangka Raya sendiri dalam mengelola sektor pariwisata dengan menggunakan anggaran dari pemerintah pusat melalui dana DAK.

Faktor berikutnya adalah berkaitan dengan keterbatasan lahan dalam menyediakan tempat parkir bagi wisatawan lokal yang ingin berkunjung, hal ini juga berkaitan dengan pemberdayaan bagi masyarakat untuk mengelola areal parkir di kawasan wisata dermaga kereng. Selanjutnya kurangnya melakukan promosi wisata alam dengan menonjolkan keunikan dan kepekaan sumber daya alam. Pihak pengelola wisata di Kota Palangka Raya melakukan promosi dengan mengangkat atau menonjolkan keunikan dan kepekaan sumberdaya alam yang ada. Karena potensi wisata di Kota Palangka Raya yang tinggi, baik dari segi lanskap, flora, fauna dan pemandangan alam.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh peneliti pada bab sebelumnya, untuk menjawab tujuan dari penelitian maka ditarik kesimpulan bahwa:

1. Strategi pemerintah daerah kota Palangka Raya dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Sebangau khususnya strategi pada pembangunan sumber daya manusia yang meliputi pembangunan pendidikan masih belum difokuskan oleh pemerintah Kota Palangka Raya, pembangunan kesehatan dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan kesehatan melalui dinas kesehatan, meningkatkan kesadaran mengenai pola hidup sehat dengan menjaga kebersihan, dan kegiatan-kegiatan sosial dalam bentuk gotong royong membersihkan kawasan Pariwisata Dermaga Kereng. Peningkatan kualitas bagi penduduk miskin seperti memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan dan kerajinan tangan masih belum dilakukan secara optimal, hal tersebut juga sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait baik pemerintah maupun swasta. Menekan laju pertumbuhan penduduk dilakukan dalam bentuk sosialisasi yang dilaksanakan oleh BKKBN tentang pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) kepada masyarakat di Kereng Bangkirai.
2. Pembangunan sumber daya alam pariwisata berkelanjutan di Kecamatan Sebangau sesuai prinsip-prinsip pengembangan wisata alam. Pengembangan kawasan wisata hanya pada sebagian kecil kawasan saja yang dibangun sarana prasarana wisata agar kelestarian alam di Kecamatan Sebangau tetap terjaga. Pengembangan wisata juga dilakukan dengan tidak mengubah dasar bentang alam, keaslian kondisi alam menjamin keberlangsungan habitat di dalamnya. Sarana prasarana wisata juga dibangun sesuai dengan identitas lokal yang mencerminkan identitas budaya Adat Dayak seperti ukiran-ukiran dengan corak Batang Garing, Rumah Betang, Mandau, Talawang, serta model ukiran lainnya yang menjadikan kawasan wisata memiliki ciri khas tersendiri.
3. Faktor pendukung strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan yang pertama adalah kesadaran masyarakat lokal akan pentingnya kawasan pariwisata. Peran pihak-pihak terkait yang ikut serta dalam mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan. Sedangkan faktor penghambat strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan yaitu untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang pariwisata kepada masyarakat. Selain itu keterbatasan anggaran dan kurangnya strategi pemasaran pemerintah daerah dalam mengenalkan pariwisata juga menjadi faktor penghambat dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

A.J. Muljadi. 2009. *Kepariwisataan dan Perjalanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Anwar, Arifin, 1984, *Strategi Komunikasi*, Bandung: Armico

Aronsson, Lars, *The Development of Sustainable Tourism* (London: Continum, 2000)

Brundtland, G.H., editor. 1987. *Report of The World Commission on Environment and Development*. The United Nation

Damanik, Dkk. 2006. *Perencanaan Ekowisata Dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: PUSPAR UGM dan Andi.

Fandeli, Chafid dan Nurdin, Muhammad. 2005. *Pengembangan Ekowisata Berbasis Konservasi Di Taman Nasional*. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan UGM

Fauzi, A. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Haryonto, Joko Tri. 2014. *Model Pengembangan Ekowisata Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Daerah Studi Kasus Provinsi DIY*.

Karyono, A. Hari. 1997. *Kepariwisataan*. Jakarta: Grasindo

Keraf, Sonny. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Buku Kompas

Kristiana, Yustisia dan Thedora, Stephanie. 2016. *Strategi Upaya Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Agrowisata Berbasis Masyarakat Kampung Domba Terpadu Juhut*, Provinsi Banten.

Kuncoro, Mudrajad. 2010. *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Marrus. 2002. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Bumi Aksa.

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, .

Mukhlis, Imam. 2009. *Eksternalitas, Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Teoritis*.

Muljadi, A.J, dan Siti Nurhayati 2002. *Kepariwisataan dan Perjalanan*. Jakarta: Rajawali Pers

Mulyadi, 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Nasution, S. 1988. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito

Pendit, Nyoman S. 2006. *Ilmu Pariwisata (Sebuah Pengantar Perdana)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam

Prajogo, M.J. 1998. *Pengantar Pariwisata Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita

Rhama, Bhayu. 2019. *Taman Nasional dan Ekowisata*. Yogyakarta: PT. Kanisius

Rhama, B. (2020). The Human Resource Policy of Tourism in Indonesia. *Opción*, 36(26), 3142-3162

Rhama, B. (2020). The meta-analysis of Ecotourism in National Parks. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 9(1), 1-17.

Rhama, B. and Reindrawati, D. Y. (2019). Geotour Guide Competency in the Context of Safety Management. *Opción*, 35(24), 885-899. .

Rhama, B. (2019). Psychological Costs on Tourism Destination. *Journal of Advanced Management Science*, 7(3), 100-106. doi: 10.18178/joams.7.3.100-106

Rhama, B. (2018). The Analysis of the Central Kalimantan Tourism Development Plan Based on Ecotourism Policy Perspective. *Policy & Governance Review*, 2(3), 204-016. doi:10.30589/pgr.v2i3.110

Rhama, B. (2014). Hubungan Antara Nilai Yang Dimiliki Stakeholder Terhadap Pengembangan Kebijakan Ekowisata Pada Taman Nasional Di Indonesia. *JISPAR*, 3(2), 47-73. doi:10.17605/OSF.IO/3ZYNH

Rhama, B. (2013). Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata di Kalimantan Tengah. *JISPAR*, 2(2), 18-23. doi:10.17605/OSF.IO/27KV5

Rhama, B. (2012). Kebijakan Publik Untuk Ekowisata di Kalimantan Tengah: Kebijakan Penataan Kawasan Ekowisata Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya. *JISPAR*, 1(1), 47-51. doi:10.17605/OSF.IO/T4W2U

Salim, Emil. 1990. *Konsep Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta.

Sein, M.T, 2009. *Sumber Daya Manusia Konsep yang Berubah Sepanjang Sejarah*. Jakarta: Prisma Vol 11.

Sharpley, Richard. 2000. *Tourism and Sustainable Development: Exploring the Theoretical Divide*, Journal of Sustainable Tourism, 8:1, 1-19

Siagan, Sogan P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

Sigit, Hananto. 1980. *Culture And Fertility The Cast Of Indonesia*. Singapore: Iseas

Steiner, George A. dan Miner, Jhon B. 1997. *Kebijakan Dan Strategi Manajemen Edisi Kedua*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Sugiyono. .2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutamihardja. 2004. *Perubahan Lingkungan Global*. Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana: IPB.

Suwantoro, Gamal. 1997. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Todaro, Michael. 2003. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta : Ghalia Indonesia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Wresniwiro. 2012. *Membangun Republik Desa*. Jakarta: Visimedia.

Yaman, Amat Ramsa & A. Mohd, “*Community -based Ecotourism: New Proposition for Sustainable Development and Environment Conservation in Malaysia*,” dalam *Journal of Applied Sciences* IV (4), 2004:583-589.

Yoeti, Oka A. 1996. *Pemasaran Pariwisata Terpadu*. Bandung: Angkasa

Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*. Semarang: Ciyapps Diponegoro University